

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan arahan bagi manusia agar tumbuh sesuai dengan apa yang ada pada diri dan lingkungannya untuk menjadi jati diri yang hakiki. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan dan diselenggarakan berdasarkan perkembangan dan potensi yang ada pada peserta didik. Potensi peserta didik harus dibina secara berjenjang dan berkelanjutan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa jalur pendidikan terbagi atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar sendiri berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir.

Manajemen sekolah atau lembaga pendidikan termasuk dalam lingkup manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki beberapa obyek garapan sesuai yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2008: 6), dengan titik tolak pada kegiatan belajar-mengajar di kelas maka sekurang - kurangnya ada

delapan obyek garapan, yaitu: 1) manajemen peserta didik, 2) manajemen personalia sekolah, 3) manajemen kurikulum, 4) manajemen sarana atau material, 5) manajemen tatalaksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah, 6) manajemen pembiayaan atau anggaran, 7) manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan, dan 8) manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan.

Barnawi & M. Arifin (2012: 47), menjelaskan pengertian sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan ini, pengertian prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Penekanan pada pengertian tersebut adalah pada sifatnya, sarana bersifat langsung dan prasarana tidak bersifat langsung dalam menunjang proses pendidikan.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan harus dicapai oleh semua jenis pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Menurut Budiyanto (2005: 11) praktek penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia hanya mengenal dua bentuk, yaitu sekolah biasa (*regular school*) dan sekolah luar biasa (*special school*). Sekolah biasa secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi siswa yang dikategorikan “normal”. Begitu pula dengan sekolah luar biasa yang secara eksklusif juga hanya diperuntukkan bagi siswa yang “berkelainan” atau “luar biasa”. Perubahan sosial sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga menuntut adanya penyesuaian.

Barnawi & M. Arifin (2012: 47), menjelaskan pengertian sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan ini, pengertian prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Penekanan pada pengertian tersebut adalah pada sifatnya, sarana bersifat langsung dan prasarana tidak bersifat langsung dalam menunjang proses pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan perlu manajemen yang baik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sesuai Husaini Usman (2013: 6), menguraikan definisi manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/madrasah, pengawas/evaluasi, dan sistem informasi sekolah/madrasah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengertian sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan namun dalam dunia pendidikan sering kali di sebut sarana prasarana pendidikan mengingat kedua alat tersebut saling berkaitan erat sebagai fasilitas pendidikan (*educational facilities*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana di SDN Tambahagung 03?
2. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana di SDN Tambahagung 03?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan perencanaan sarana dan prasarana di SDN Tambahagung 03.
2. Untuk mendiskripsikan cara pengadaan sarana dan prasarana di SDN Tambahagung 03.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis bagi penyusun dan sekolah.

1. Kegunaan secara teoretik

Sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dan menerapkan untuk kasus nyata yang terjadi di lapangan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada umumnya, khususnya mengenai manajemen sarana dan prasarana pembelajaran pada pendidikan inklusif di Sekolah Dasar (SD).

2. Kegunaan secara praktis

Bagi penyusun, untuk memperoleh inspirasi, persepsi dan kreatifitas dalam menggali dan mengekspresikan pengetahuan melalui penulisan ilmiah, memberi dorongan dan motivasi untuk belajar lebih banyak serta mendapatkan pengalaman yang intensif berkaitan dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Disamping itu manfaat praktis yang didapatkan oleh masing-masing pihak terkait adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Kepala Sekolah SDN Tambahagung 03, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih efektif.
- b. Bagi Koordinator Sarpras Yayasan, sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan manajemen sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan dari siswa ABK.
- c. Bagi Yayasan, sebagai gambaran pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah.
- d. Bagi guru, sebagai bahan referensi para guru dalam mengefektifkan pengelolaan sarana pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah secara bijak dan baik.
- e. Wali murid, sebagai bukti pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana yang dilakukan di sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pelibatan orang tua murid dalam monitoring penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah.